

Nilai Moral: Sebuah Problematis Dilematis Psikis-Individual-Sosial Bagi Siswa

Abstract

Moral education is very important for student to improve intelligence, emotional and spiritual. School arrange kreatif innovations of moral values learning program in form of real behaviour and attitude, not only conceptual. Moral education has always been an issue in schools. Although the methodology and the content have changed over the past years, ways to implement and bring these theories into the classroom and internalize them within children is still one of the important research topics.

Keyword: value, moral education

Pendahuluan

Fenomena runtuhnya solidaritas pendidikan moral di sekolah mau tidak mau kita harus memikirkannya. Secara teoritis dan faktual, pendidikan moral yang pertama dan utama adalah di rumah. Faktor pertamanya adalah lingkungan keluarga terlalu sempit sebagai tempat mendapatkan dan berlatih menerapkan nilai-nilai moral. Dari orang tua atau *significant others* yang lain anak-anak pertama kali memperoleh nilai-nilai moralitas yang digunakan sebagai acuan untuk hidup bersama. Tetapi harus pula diakui bahwa menyerahkan pendidikan moral sepenuhnya kepada orangtua ternyata tidaklah memadai. Hal yang terjadi banyak orangtua masa kini hampir tidak punya waktu untuk mendidik anak-anak. Semua diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Fakta disekolah seringkali nilai-nilai yang diberikan guru lebih diikuti oleh anak-anak daripada dari orangtuanya. Faktor-faktor tersebut memberikan pendidikan moral menjadi sebuah imperatif bagi sekolah.

Semakin tingginya kasus amoral/asusila yang terjadi di Indonesia, mulai dari korupsi, kolusi, penggunaan narkoba, sampai dengan tawuran antarsekolah, seks bebas, dan berbagai kasus lainnya merupakan fenomena yang mengandung keprihatinan. Dalam kondisi seperti ini, dunia pendidikan menjadi sorotan. Pendidikan dinyatakan telah gagal

mencetak generasi yang cerdas secara intelegensi, emosional, dan spiritual. Masalah ini seharusnya bukan dijadikan wacana perdebatan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang harus bertanggung jawab, namun harus menjadi bahan pemikiran untuk mencari solusi tepat sebagai upaya mengatasinya. Bagi sektor pendidikan, sudah saatnya membuat inovasi cerdas dalam sistem pendidikan. Suara kepedulian yang meneriakan pentingnya diangkat kembali pendidikan moral dan budi pekerti yang sebaiknya diintegrasikan menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah seperti ini harus menjadi perhatian. Persoalannya adalah bagaimana pendidikan moral tersebut diberikan di sekolah? Apakah harus menambah pelajaran baru? Atau memasukkan unsur-unsur pendidikan moral ke dalam berbagai mata pelajaran yang dipandang relevan saja?

Pendidikan Moral Menjadikan Manusia Berkepribadian Utuh

Moral dalam arti yang luas telah mencakup bagaimana hubungan dengan Tuhan, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam semesta. Menurut Syahrin (2005: 45) orang yang memiliki moral yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan ketiga hubungan di atas pada setiap tempat dan setiap waktu. Moral juga harus dipandang sebagai suatu yang memiliki nilai otonom dan universal sehingga ia dapat berlaku pada lintas waktu, lintas aktivitas dan lintas tempat.

Konsep 'moralitas' dan 'pendidikan moral' diperdalam, tidak hanya mengenai pengenalan nilai-nilai, tetapi diteruskan sampai ke pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai. Pada saat ini pendidikan moral lebih banyak berupa sopan santun, etika, sikap hormat dan saling menghargai dalam arti berdasarkan acuan-acuan nilai budaya dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat, keluarga dan sekolah.

Banyak orang beranggapan bahwa pendidikan moral anak hanya tanggungjawab kedua orangtua, sehingga mereka acuh tak acuh melihat perilaku immoral yang dilakukan oleh anak orang lain. Sebenarnya pendidikan moral anak adalah tanggungjawab sosial, dalam arti setiap anggota masyarakat seharusnya saling peduli dan mengawasi serta saling melakukan langkah edukatif terhadap perilaku anak-anak dalam komunitas

tersebut, sekalipun bukan anaknya sendiri. Akan tetapi kasus yang sering kita lihat adalah seseorang atau keluarga akan marah atau tersinggung ketika ada laporan dari orang lain tentang perilaku immoral yang dilakukan anaknya. Oleh karena itu, seharusnya dalam setiap komunitas terbentuk komitmen bersama untuk mewujudkan hal itu, sehingga tiada lagi kesalahpahaman dan tidak banyak lagi peluang bagi para anak bangsa untuk melakukan perilaku

Menurut Syaiful (2005:59) Perbedaan aspek psikologis anak tidak dapat dihindari, hal ini disebabkan pembawaan dan lingkungan anak didik yang berlainan antara satu dengan yang lainnya. Persoalan psikologis ini memang sangat kompleks, sebab menyangkut apa yang ada dalam jiwa dan perasaan anak didik. Untuk bisa memahami jiwa anak didik guru dapat melakukan pendekatan kepada anak didik secara individual. Permasalahan psikologis anak didik yang muncul menambah beban tugas guru menjadi lebih ekstra hati-hati. Perbedaan anak didik harus dipahami guru agar dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan yang akurat dan menjadi strategi untuk mendukung keberhasilan penanaman nilai-nilai moral dalam pembelajaran.

Melalui proses pendidikan, manusia diharapkan dapat memperoleh 'kemanusiaannya', sehingga dapat menyadari realitas sosial yang terjadi disekitarnya dan menyadari perannya untuk berperilaku sebagaimana mestinya atas realitas sosial tersebut. Terkait dengan adanya *educational state role*, maka pemerintah menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan formal dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut sebagaimana diamanatkan oleh *groundnourm* negara Indonesia, UUD 1945. Dan pendidikan merupakan hak positif warga negara, yang berarti bahwa pemerintah wajib campur tangan dalam proses penyelenggaraannya selama tidak bersinggungan dengan hak negatif. Sehingga cukup beralasan bila sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya hingga era orde baru ditutup dengan kelahiran era reformasi, segala sesuatu hal yang berkenaan dengan pendidikan, menjadi urusan pemerintah secara sentralistis. Namun sejak era reformasi inilah, kesadaran berbagai kalangan diluar pemerintah akan dunia pendidikan semakin meluas. Tingkat kesesuaian kurikulum terkait dengan evaluasi proses pendidikan dan tujuan awal pendidikan yang dirancang oleh pemerintah menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebab, peningkatan pemerataan akses

pendidikan formal malah berbanding lurus dengan tingginya angka kriminalitas, tindakan asusila, dan bahkan tindak korupsi terstruktur secara terang-terangan.

Pendidikan moral merupakan prioritas utama karena memang tujuan pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia dan menjadikannya manusia yang memiliki kepribadian utuh. Selain itu, dalam pendidikan tidak hanya memprioritaskan kemampuan kognitif (intelektual), namun juga afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan). Jadi pendidikan itu idealnya tidak hanya mementingkan satu ranah intelektual saja namun juga dari segi sikap dan ketrampilannya. Pendidikan moral sangatlah perlu bagi manusia, karena melalui pendidikan perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi dan sesuai dengan norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Di Indonesia pendidikan moral telah ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di Sekolah Dasar perkembangan pendidikan moral tak pernah beranjak dari nilai-nilai luhur yang ada dalam tatanan moral bangsa Indonesia yang termaktub jelas dalam Pancasila sebagai dasar Negara. Dengan pemberian pendidikan moral tersebut diharapkan dapat membentuk individu yang berkualitas sehingga bisa membangun bangsa.

Desain Pembelajaran Pendidikan Nilai-Nilai Moral

Konon, kurikulum sekolah-sekolah di Indonesia tergolong terpadat dibandingkan dengan kurikulum di negara-negara lain. Artinya, murid-murid kita tergolong manusia-manusia muda yang paling “tersiksa” dibandingkan rekan-rekan mereka dari negara lain akibat beban kurikulum yang amat sarat tersebut. Karena itu, adalah mustahil untuk menambah beban mereka dengan memasukkan pendidikan moral ke dalam kurikulum pendidikan/sekolah. Jadi pendidikan moral sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan yang tak tertulis atau yang biasa disebut dengan hidden curriculum. Dengan hidden curriculum ini, maka pendidikan moral tidak akan memberi beban tambahan bagi murid.

Melalui hidden curriculum ini nilai-nilai moral tersebut diinternalisasikan ke dalam sistem kesadaran murid. Implementasi hidden kurikulum terjadi seperti kehidupan di dalam kelas yang di dalamnya terdapat banyak murid yang berinteraksi satu dengan lainnya sebagai salah satu bentuk kehidupan sosial. Kelas juga membutuhkan seperangkat nilai untuk mengatur hubungan atau interaksi antara murid dengan murid

atau murid dengan guru sehingga tercipta interaksi yang sehat dan saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Nilai-nilai yang dimaksud berupa aturan-aturan yang mesti disepakati dan dilaksanakan bersama.

Student Report Cards (SRC) adalah sebuah inovasi metode penyampaian pendidikan nilai yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan formal sebagai sarana untuk menginternalisasikan pendidikan nilai dalam keseharian peserta didik. Metode ini diadopsi dari metode buku penghubung yang pernah digunakan oleh sekolah dasar sebagai sarana penghubung antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik dalam monitoring keseharian peserta didik dalam pengerjaan tugas-tugas sekolah. Selain itu, aplikasi metode SRC yang minim biaya ini juga dapat memberikan kontribusi positif untuk menumbuhkan kebiasaan menulis, rasa percaya diri, dan kreatifitas dalam diri peserta didik sejak usia dini.

Begitulah yang terjadi, bahwa kepintaran dan kecerdasan intelektual saja tidak cukup tanpa dilandasi oleh nilai-nilai moral. Tanpa adanya nilai moral, amanah besar yang dibebankan tidak bisa dilaksanakan dengan jujur. Kalau amanah yang dibebankan itu kecil, tidak terlalu bermasalah. Tetapi kalau amanah yang dibebankan itu sangat besar seperti Negara atau kekayaan Negara, maka ketidakamanahan memiliki akibat yang sangat besar, seperti yang terjadi sekarang pada negara Indonesia. Ketiadaan moral itulah yang mengakibatkan terjadinya berbagai kekacauan dewasa ini.

Berangkat dari tujuan tersebut diatas maka dalam pelaksanaannya terdapat tiga faktor penting dalam pendidikan moral di Indonesia yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Peserta didik yang sejatinya memiliki tingkat kesadaran dan dan perbedaan perkembangan kesadaran moral yang tidak merata maka perlu dilakukan identifikasi yang berujung pada sebuah pengertian mengenai kondisi perkembangan moral dari peserta didik.
2. Nilai-nilai (moral) berdasarkan tahapan kesadaran dan perkembangan moral manusia maka perlu di ketahui pula tingkat tahapan kemampuan peserta didik. Dengan demikian harus difahami pula proses pemahaman peserta didik berdasar pada tingkat kesadaran dan tingkat kekuatan nilai kesadaran itu sendiri
3. Guru Sebagai fasilitator, fasilitator dalam memberikan kemungkinan bagi siswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai pendidikan moral itu.

Menurut Djohar (2006: 89) cara belajar-mengajar yang menciptakan interaksi antara siswa dengan objek dan persoalan belajar dimulai dari guru mampu menterjemahkan kurikulum secara struktural, yakni menterjemahkan kurikulum secara konseptual, kemudian menyatakan peta konsep kurikulum itu, memilih konsep yang essensial, kemudian menyusun bahan ajar dan menentukan objek dan persoalan belajar. Belajar dengan cara ini membawa siswa tidak hanya dalam bentuk tekstual akan tetapi berubah menjadi objek dan persoalan nyata. Dengan demikian siswa dihadapkan pada objek dan persoalan belajar yang benar-benar nyata ada disekeliling hidupnya. Dan itu sangat mendukung perkembangan psikis-individual dan sosial anak didik dalam menghadapi pengalaman hidupnya.

Pendidikan moral menjadi sangat penting dilaksanakan, tetapi hal itu dianggap di luar tujuan pendidikan, ketika kecerdasan yang diukur dengan ranking merupakan salah satu ukuran keberhasilan seseorang. Siswa satu dengan yang lain tidak diajari untuk bekerjasama, tetapi diajari untuk berkompetisi. Oleh karena itu saat ini tidak ada tradisi belajar bersama, yang ada adalah tradisi masuk bimbingan belajar, di situ mereka bisa bersaing secara individual.

Untuk mengembangkan strategi dan model pembelajaran pendidikan moral dengan menggunakan pendekatan terpadu, diperlukan adanya analisis kebutuhan (*needs assessment*) siswa dalam belajar pendidikan moral. Dalam kaitan ini diperlukan adanya serangkaian kegiatan, antara lain:(1) mengidentifikasi isu-isu sentral yang bermuatan moral dalam masyarakat untuk dijadikan bahan kajian dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode klarifikasi nilai, (2) mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan siswa dalam pembelajaran pendidikan moral agar tercapai kematangan moral yang komprehensif yaitu kematangan dalam pengetahuan moral perasaan moral,dan tindakan moral, (3) mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah dan kendala-kendala instruksional yang dihadapi oleh para guru di sekolah dan para orang tua murid di rumah dalam usaha membina perkembangan moral siswa,serta berupaya memformulasikan alternatif pemecahannya, (4) mengidentifikasi dan mengklarifikasi nilai-nilai moral yang inti dan universal yang dapat digunakan

sebagai bahan kajian dalam proses pendidikan moral, (5) mengidentifikasi sumber-sumber lain yang relevan dengan kebutuhan belajar pendidikan moral.

Mengingat pentingnya pendidikan moral, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama melainkan mengarah pada anak didik untuk menjadi manusia yang benar-benar mempunyai kualitas keberagamaan yang kuat. Materi yang ada bukan hanya menjadi pengetahuan melainkan membentuk sikap dan kepribadian anak didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa dalam arti yang sesungguhnya.

Pendekatan praktis dalam pendidikan moral dapat ditempuh dengan menjadikan pendidikan budi pekerti sebagai mata pelajaran tersendiri yang dicantumkan dalam struktur program kurikulum. Konsep pendekatan praktis didasari oleh landasan berpikir bahwa tidak mungkin seorang anak akan mau dan mampu melakukan sesuatu jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal yang akan dilakukan itu. Pengetahuan tentang kejujuran, swa-disiplin, menghargai orang lain, kasih sayang, ramah tamah, penghormatan, cinta tanah air, dan lain-lain, sudah agak jauh dari benak anak didik. Agar anak memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai luhur tersebut maka harus diajarkan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Seharusnya, mengembalikan keluarga sebagai pusat pendidikan budi pekerti utama merupakan alternatif yang paling tepat dipilih. Untuk itu menjadikan orangtua sebagai pendidik moral adalah hal yang tidak boleh ditawar. Kembalikan fungsi pendidikan keluarga sebagaimana seharusnya, ialah tempat interaksi pengembangan kecerdasan budi, mengasah akhlak dan membangun peradaban. Dari keluargalah sesungguhnya pendidikan budi pekerti harus disemaikan.

Penutup

Posisi pendidikan nilai menjadi sangat vital dalam pembentukan pribadi manusia, sebab manusia yang memiliki kecerdasan intelektual setinggi apapun tidak akan bermanfaat secara positif bila tidak memiliki kecerdasan afektif secara emosional, sosial, maupun spiritual. Tereliminasi pendidikan nilai pada kurikulum lembaga pendidikan formal disinyalir oleh berbagai kalangan sebagai salah satu penyebab utama akan

kemerosotan moral dan budi pekerti masyarakat yang tercermin dari tingginya angka kriminalitas maupun perbuatan amoral. Dalih integrasi pendidikan nilai dalam pendidikan kewarganegaraan dan keagamaan, pada implementasinya menjadi tidak tepat sasaran karena pendidikan nilai diberikan dengan metode hapalan dengan porsi yang minim untuk memenuhi evaluasi proses pendidikan yang hanya mengukur ranah kognitif semata. Tentunya hal tersebut bertolakbelakang dengan prinsip pendidikan nilai yang mencakup ranah afektif dan tidak dapat terukur dengan model evaluasi pendidikan sebagaimana ditentukan oleh sistem pendidikan nasional. Yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan moral ialah bahwa setiap guru melalui mata ajar yang diampunya menjelaskan secara eksplisit nilai-nilai yang terdapat dalam mata ajarnya. Kemudian petugas bimbingan dan penyuluhan membimbing para siswa mendiskusikan segenap jenis nilai yang telah disentuh oleh para guru. Melalui diskusi mereka dapat dituntun untuk memahami makna nilai-nilai tadi dalam kehidupan nyata. Melalui proses ini para siswa akan menyusun sendiri sistem nilai (*value system*) mereka, baik sistem nilai pribadi, maupun sistem nilai kelompok.

Referensi

- Dedi Supriadi. 2004. *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Djohar. 2006. *Guru Pendidikan dan Pembinaannya*. Yogyakarta. CV.Grafika Indah
- Kohlberg, L. & Turiel, E. (1971). *Moral development and moral education*. In G. Lesser, ed. *Psychology and educational practice*. Scott Foresman.
- Nurul Zuriah.2007. *Pendidikan Moral dan Pekerti dalam Prespektif Perubahan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Piaget, J. (1965). *The moral judgment of the child*. The Free Press: New York. Power, F. C., Higgins, A., & Kohlberg, L. (1989). "Lawrence Kohlberg's Approach to Moral Education." New York: Columbia University Press
- Syahrin Harahap. 2005. *Penegakan Moral Akademik Di Dalam dan Di Luar Kampus*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*. Jakarta. Rineka Cipta